

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah – langkah metode penelitian. Menurut Cooper dalam Creswell (2010) mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, diantaranya : menginformasikan kepada pembaca hasil – hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur – literatur yang ada, dan mengisi celah – celah dalam penelitian – penelitian sebelumnya. Menurut Meoleong (2007), acuan teori harus sesuai dengan fokus penelitian. Fokus penelitian yang saya teliti yaitu tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan upaya peneliti untuk memperoleh referensi dan mencari perbandingan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu berguna untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, digunakan untuk membantu penelitian yang nantinya dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian. Sebagai penguat di dalam penelitian ini, peneliti mencari referensi dengan substansi yang sama yang disajikan dalam penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian yang lainnya dengan konteks, tema, ataupun topik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti teliti, yaitu mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Sebagai bahan pertimbangan penelitian, peneliti memilih tiga penelitian terdahulu yang disajikan sebagai acuan dalam Menyusun Skripsi, antara lain :

1. Penelitian pertama, dilakukan oleh **Roshief Fani Maulana** yang mengambil sebuah judul “ Efektivitas Pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat, Lingkungan Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Dan Bencana Alam Sebagai Implementasi Csr Di Pt. Otsuka Indonesia “. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini keseluruhannya berjumlah 4 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT. Otsuka Indonesia sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan tolak ukur efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2007) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program sudah sesuai antara apa yang dilakukan oleh PT. Otsuka Indonesia kepada masyarakat yang menerima CSR tersebut. Selain itu, program CSR yang dilakukan oleh PT. Otsuka Indonesia ini memenuhi indikator efisiensi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) yang menyebutkan bahwa proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
2. Penelitian kedua, dilakukan oleh **Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli** yang mengambil sebuah judul “ Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga “. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pembahasan mengenai hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PMBRW dimulai dari tahapan

persiapan, tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan dan ditinjau dari kriteria aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, bahwa program pemberdayaan masyarakat rukun warga di Kelurahan Meranti dianggap telah efektif.

3. Penelitian ketiga, dilakukan oleh **Agung Aldino Putra** yang mengambil sebuah judul “ Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama) “. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, perpustakaan belajar, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kube yang dilaksanakan di Palu belum berjalan Efektif dan maksimal, mengingat kriteria yang dikemukakan Duncan yang dimiliki proses pencapaian pertama tidak menunjukkan hasil yang diinginkan, karena terhambatnya anggaran yang diterima pelaksana dalam hal ini dinas sosial Palu, sehingga pada saat nya menjadi terhambat, dan tujuan bantuan ini peneliti merasa tepat sasaran karena tidak mengikuti aturan, dan ada pula yang mengikuti tidak memiliki hubungan dengan Kube telah berkontribusi melakukan intervensi dalam memilih target dan ingin memanfaatkan kan bantuan ini, baik mengenai integrasi di mana pemerintah sendiri tidak melakukan sosialisasinya pengundian tersebut setelah peneliti melakukan penelusuran ke desa Lere dan ke masyarakat penerima manfaat mengatakan untuk program ini pada tahun 2016 belum ada yang di sosialisasikan dan bertentangan dengan apa yang ada dikatakan oleh dinas sosial sendiri bahwa sosialisasi mereka di wilayah tersebut hanya sekali saja.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Roshief Fani Maulana	Efektivitas Pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat, Lingkungan Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Dan Bencana Alam Sebagai Implementasi Csr Di Pt. Otsuka Indonesia	Efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2007)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
2.	Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli	Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga	Menurut Duncan dalam Steers (2003) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi"	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
3.	Agung Aldino Putra	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di	Menurut Duncan dalam Steers	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Perpustakaan

		Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama)	(2003) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi"			Belajar, Dan Dokumentasi
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti (2024)

Relevansi ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat pada urgensi penelitian atau bisa disebut dengan tingkat kepentingan penelitian yaitu terletak pada fenomena atau permasalahan berdasarkan penajagan awal peneliti yang di mana penelitian ini penting untuk dilaksanakan, kemudian terkait *novelty* penelitian yang di mana hal kebaruan yang ada di penelitian ini akan bermanfaat untuk kehidupan nantinya, penelitian ini akan menjadi solusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait fokus Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Kemudian, kebaruan dan kemutakhiran penelitian yang di mana peneliti menggunakan teori serta objek dan subjek yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

2.1.2 Kajian Terhadap Grand Theory

2.1.2.1 Tinjauan Tentang Administrasi

Soewarno Handayani (1988:2), “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie*, yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. **The Liang Gie** (1980:9) mengatakan bahwa “Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi mengandung tiga muatan, yakni:

1. Administrasi sebagai seni adalah sebuah proses yang hanya diketahui permulaannya saja, sedang akhirnya tidak ada.
2. Administrasi mengandung unsur-unsur tertentu yakni adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan untuk pelaksanaan tugas (termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi dan unsur lainnya)
3. Administrasi sebagai proses kerjasama yang telah ada sejak manusia ada.

Irra Chisyanti Dewi (2011: 3), mengatakan bahwa “administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan”.

Tead dikutip oleh **Akadun (2009:37)** mendefinisikan administrasi sebagai berikut: “Administrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan individu-individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan fasilitas usaha kerjasama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan”.

Siagian (2012:13) berpendapat bahwa “administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Simon dalam Pasolong (2010:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu:

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti.
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat, catat mencatat,

ketatausahaan dan lainnya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2.2 Tinjauan Tentang Administrasi Publik

Administrasi Publik terdiri dari dua suku kata yaitu “*Administrasi*” dan “*Publik*”. Kehadiran Administrasi dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan kebutuhan, administrasi adalah kumpulan norma yang dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. **Chandler dan Plano dalam Revida dkk (2020:3)**, mengatakan bahwa “definisi dari administrasi publik ialah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk perumusan, pengimplementasian, dan mengelola keputusan serta kebijakan publik”. **Pasolong (2014)** menjelaskan bahwa “administrasi publik ialah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”.

Rosenblom dalam Pasolong (2014:8) menyatakan bahwa : “Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori – teori dan proses – proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi – fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”.

Harbani dalam Pasolong (2011:7) mengatakan bahwa : “Administrasi publik adalah proses di mana Sumber Daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik”.

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2012:55), berpendapat mengenai administrasi publik yaitu : “Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*Public Affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik

sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan Masalah Publik melalui perbaikan – perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan”.

Henry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan Administrasi Publik yaitu :
“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang di perintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial”.

Berdasarkan pendapat para ahli bahwa administrasi publik berhubungan dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap orang atau sarana prasarana untuk mencapai tujuan publik kepada masyarakat.

2.1.2.3 Tinjauan Tentang Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani Organon, yang berarti “alat” (*tool*). Kata ini termasuk ke bahasa Latin, menjadi “*organization*” dan kemudian ke bahasa Prancis (abad ke-14) menjadi “*organization*”. Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut **Mariane n d, (2018)** organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organize* yang berarti yang menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Dilihat dari segi ini, organisasi bisa berarti organisme, yang melakukan *organizing*, dan bisa juga berarti keluaran (produk, *output*) *organizing*.

Organisasi menurut **John D. Millet (1954)** yang dikutip buku **Syafiie, n.d. (2017)** yang berjudul “Ilmu Administrasi”, mengemukakan bahwa

Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose. (Maksudnya organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama).

Berdasarkan definisi diatas bahwa organisasi kerangka dimana kumpulan orang-orang bekerja dalam mencapai tujuan bersama.

organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelations in a administrative system. (Maksudnya organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi).

Berdasarkan teori diatas bahwa organisasi suatu organ yang dimana di dalamnya memiliki kewenangan serta budaya hubungan antara orang-orang dalam suatu sistem yang di dalamnya tercakup administrasi.

Organisasi menurut **Luther Gulick** yang dikutip buku **Syafiie, n.d, (2017)** yang berjudul “Ilmu Administrasi”

Organization is the means of interrelating the subdivisions of work by allotting the to man who are placed in a structure of authority, so that the work may be coordinated by orders of superiors to sub ordinates, reaching from the top to the bottom of the entire enterprise. (Maksudnya, organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha).

Dari beberapa definisi diuraikan penulis berpendapat bahwa organisasi antara lain yaitu:

- 1) Organisasi sebagai wadah tempat terselenggaranya administrasi
- 2) Di dalam organisasi terdapat hubungan antara dua orang atau lebih, baik individu maupun kelompok
- 3) Adanya kerjasama dan pembagian tugas

- 4) Melakukan proses aktivitas yang sesuai dengan kinerja dan kewenangan yang diberikannya
- 5) Adanya tujuan bersama – sama yang ingin di capai.

Dalam organisasi terdapat sekumpulan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, maka dalam mencapai tujuan dan sasarannya sebuah organisasi memiliki prinsip untuk melakukan pencapaian tujuan organisasi.

2.1.3 Kajian Terhadap Middle Theory

2.1.3.1 Tinjauan Tentang Manajemen

Definisi Manajemen secara etimologi “manajemen berasal dari kata *manajege* yang berarti mangator” sedangkan menurut terminologi banyak pakar dan ahli pendidikan telah menguraikan tentang definisi Manajemen.

Fatah Syukur (2011:7) mendefinisikan Manajemen sebagai : *“Management is general refers to planning, organizing, controlling, stuffing, leading, motivating, communicating, and dicision, making activities perfomed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or sevice”*.

Maksud dari ungkapan diatas adalah manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas – aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengorganisasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit

adalah manajemen sekolah atau madrasah, yang meliputi : perencanaan program sekolah, melaksanakan program sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengawasan atau evaluasi dan sistem informasi sekolah.

Nickel, dan McHugh dikutip Dinn Wahyudin (2015:5) mengatakan bahwa :
 “*Management*” merupakan *the proses used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and controlling, people another organizational resources.*

Sergiovanni etc, dalam Bafadhal (2006:4) mengatakan bahwa manajemen sebagai proses *"of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently"*. manajemen sebagai proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Di dalam manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasi (*Organizing*) pengerahan (*Leading*), dan pengawasan (*controlling*). **Hamalik, (2006:16)** mengatakan bahwa dengan manajemen sesuatu akan mudah diatur dan belajar bagaimana mendayagunakan sekelompok orang yang di fasilitas yang ada untuk dilibatkan dalam suatu tujuan tertentu.

Manajemen merupakan suatu proses sosial yang berhubungan dengan keseluruhan usaha manusia dengan manusia lain serta sumber-sumber lainnya dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas, secara keseluruhan definisi manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu.
- b. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- c. Seluruh perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Mariane (2018) mengatakan bahwa: "Manajemen ialah proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan dengan menggunakan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan". Unsur-unsur Manajemen antara lain:

- a) Men yaitu tenaga kerja manusia baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b) Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Methods yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan.
- d) Materials yaitu bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- e) Machiness yaitu mesin/alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- f) Market yaitu pasar untuk menjual barang dan jas-jasa yang dihasilkan

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Tinjauan Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karier karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. **Sedarmayanti (2007:11)** mengemukakan bahwa: "Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses Pemanfaatan SDM secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan"

Hamali (2016:2) mengatakan bahwa "Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu pendekatan yang Strategis terhadap keterampilan motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya".

Mariane (2018) mengemukakan bahwa : "Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan".

Wulandari (2020) mengemukakan bahwa fungsi pokok Manajemen Sumber Daya Manusia sama dengan fungsi manajemen yaitu:

- 1) Fungsi perencanaan, merupakan fungsi yang berkaitan dengan melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengadaan tenaga kerja, pengembangan dan pelatihan.
- 2) Fungsi pengorganisasian, merupakan fungsi yang berkaitan dengan menyusun suatu organisasi serta mendesain struktur organisasi, menyajikan hubungan antara tugas yang dikerjakan oleh tenaga kerja dan menyiapkan peran organisasi.
- 3) Fungsi pengarahan, merupakan fungsi yang berkaitan dengan memberikan dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
- 4) Fungsi kepemimpinan, merupakan proses bagaimana seorang pemimpin mampu mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan bawahan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan.
- 5) Fungsi pengendalian, merupakan fungsi dalam melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan perbandingan dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari beberapa definisi manajemen sumber daya manusia di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan manusia melalui proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan pemberian kompensasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2.1.4 Kajian Terhadap Applied Theory

2.1.4.1 Konsep Efektivitas Program

Efektivitas Program merupakan sebuah tolak ukur yang dijadikan untuk melihat sejauh mana program tersebut berjalan dengan hasil dikatakan efektif. Hal tersebut dilihat dari usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Dalam efektivitas program terdapat tingkat efektivitas yang diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tetapi, jika hasil rencana dan tindakan yang dilakukan tidak tepat maka dapat menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai, dan hal itu dikatakan tidak efektif.

Campbell JP dalam Mutiarin (2014) menjelaskan bahwa “efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Diperlukan pengukuran efektivitas yang relevan yakni :

- a) Keberhasilan program
- b) Keberhasilan sasaran
- c) Kepuasan terhadap program
- d) Kesesuaian *input* dan *output*
- e) Pencapaian tujuan menyeluruh

Berdasarkan indikator pengukuran diatas dapat diartikan dalam keberhasilan program adanya suatu proses dalam suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan, lalu dalam keberhasilan sasaran di ukur berdasarkan tingkat *input* maupun *output* yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian dalam kepuasan program mengacu pada kebutuhan pengguna dari kepuasan yang dirasakan terhadap kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan. Selain itu dalam tingkat *input* maupun *output* ditinjau dari seberapa besar perbandingan *input* dan *output* tersebut. Dan yang terakhir dalam pencapaian tujuan menyeluruh adanya penilaian umum

terkait sejauh mana suatu organisasi melaksanakan tugasnya. Untuk itu, dikatakan efektif atau tidaknya suatu program yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari tujuan program itu sendiri. Jika tujuan yang telah dirumuskan efektif maka efektivitas program akan lebih mudah untuk diukur.

Duncan dalam Steers menjelaskan bahwa sejauh mana suatu organisasi dapat memperoleh dan menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat mencapai tujuan operasional dan operasionalnya adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang efektivitas organisasi. Dalam meneliti efektivitas maka diperlukan tiga konsep yang saling terkait harus dipertimbangkan secara bersamaan yaitu :

- a. Pencapaian tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

Berdasarkan indikator pengukuran diatas dapat diartikan dalam pencapaian tujuan terdapat proses dari awal tahapan hingga akhir tahapan yang disebut dengan periodisasi, kemudian dalam integrasi terdapat sosialisasi sebagai komunikasi dengan berbagai macam organisasi. Dan yang terakhir dalam adaptasi terdapat proses penyesuaian diri terhadap perubahan — perubahan yang terjadi di lingkungan. Maka ketiga hal tersebut harus terpenuhi agar suatu kegiatan di organisasi itu dikatakan efektif.

Campbell JP (1997) menjelaskan bahwa efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program –program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas — tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dalam mewujudkan efektif atau tidaknya suatu program dibutuhkan pengukuran yang tepat yakni:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Kesesuaian input dan output
- e. Peneapaian tujuan menyeluruh

Berdasarkan indikator pengukuran diatas dapat diartikan dalam keberhasilan program adanya suatu proses dalam suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan, lalu dalam keberhasilan sasaran di ukur berdasarkan tingkat *input* maupun *output* yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian dalam kepuasan program mengacu pada kebutuhan pengguna dari kepuasan yang dirasakan terhadap kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan. Selain itu, dalam tingkat *Input* dan *Output* ditinjau dari seberapa besai perbandingan *Input* dan *Output* tersebut. Dan yang terakhir dalam pencapaian tujuan menyeluruh adanya penilaian umum terkait sejauh mana suatu organisasi melaksanakan tugasnya.

Riant Nugroho (2011:650-652) mengemukakan bahwa pada prinsipnya ada lima dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan suatu kebijakan ataupun program, yakni : Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.

Berdasarkan dimensi pengukuran efektivitas diatas dapat diartikan dalam tepat kebijakan terdapat tiga sisi yang penting yakni sisi pertama sejauh mana kebijakan telah memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua perumusan masalah yang sudah sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan sisi ketiga kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian dalam tepat pelaksanaan terdapat tiga lembaga yang menjadi aktor yaitu pemerintah, masyarakat, atau swasta. Lalu dalam tepat target terdapat 3 hal yakni target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, dan Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru. Selain itu, dalam tepat lingkungan terdapat dua lingkungan

yang menentukan yakni lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Dan yang terakhir dalam tepat proses terdapat tiga proses yakni, pertama publik memahami kebijakan sebagai aturan main, kedua publik menerima kebijakan sebagai aturan main, dan yang ketiga publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan.

Edy Sutrisno (2018:125-126) mengemukakan bahwa untuk mewujudkan suatu program yang efektif maka diperlukan pengukuran program dengan lima indikator yang saling berkaitan yaitu :

- a. Pemahaman program
- b. Tepat sasaran
- c. Tepat waktu
- d. Tercapainya tujuan
- e. Perubahan nyata

Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas di atas dapat diartikan dalam pemahaman program di lihat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami program. Lalu dalam tepat sasaran di lihat dari bagaimana pemerintah merealisasikan program ini kepada masyarakat sebagai sasaran. Kemudian dalam tepat waktu di lihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selain itu, dalam tercapainya tujuan di lihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya. Dan yang terakhir dalam perubahan nyata di lihat sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa suatu program dikatakan efektif bila di lihat berdasarkan rencana dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian pada penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas **Edy Sutrisno (2018:125-126)**

karena peneliti ingin mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung melalui pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Selain itu alasan peneliti menggunakan teori efektivitas **Edy Sutrisno (2018:125-126)** sebagai pengukuran efektivitas adalah karena teori ini sangat relevan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan yakni permasalahan tersebut terkait dengan indikator pemahaman program, tepat waktu, dan tercapainya tujuan.

2.1.4.2 Konsep Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital

IKD atau Digital ID adalah **KTP-el berbentuk digital** yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan *Dokumen Kependudukan* dan *data balikan* dalam aplikasi digital melalui gawai (*smartphone*) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2). IKD ini bertujuan untuk (a) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; (b) meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; (c) mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan (d) mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Tiga fungsi IKD, meliputi (1) untuk pembuktian identitas, yang dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan IKD; (2) untuk autentikasi identitas, yang dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan *quick response* (QR) code untuk pembuktian pemilik IKD; dan (3) untuk otorisasi identitas, yang merupakan hak otorisasi pemilik IKD terhadap data IKD untuk dapat diakses oleh Pengguna data.

IKD mulai diterapkan untuk masyarakat umum sejak awal tahun 2023 lalu. Awalnya, sekitar pertengahan tahun 2022 lalu, terlebih dahulu IKD diujicobakan kepada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil kabupaten/kota, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan Digital ID yang sedang dikembangkan. Tahap selanjutnya, IKD diterapkan kepada pegawai ASN seluruh Indonesia, kemudian barulah diterapkan kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Pada tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah menargetkan penerbitan IKD sebanyak 25% dari total perekaman. Hingga saat ini, di Kabupaten Ogan Ilir sudah diterbitkan 8.711 IKD atau sekitar 2,87% dari total perekaman.

Selain KTP-el dalam IKD juga terdapat biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dokumen lainnya (seperti BPJS, NPWP, NIP, dll) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memiliki IKD, kita dapat memastikan data kita aktif dan dapat digunakan di pelayanan publik lainnya, seperti dalam verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, pelayanan bandara, perbankan, dan lain-lain. Nantinya, kita juga dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi ini. Selain itu, pada kegiatan Dukcapil Goes to Campus di Auditorium Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (02/05/2023), Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Bapak Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. mengatakan ke depannya, “Cukup melakukan *single sign on* IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, *payment gateway*, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya.”

Bagaimana keamanan IKD? Keamanan IKD berpedoman pada *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission* dan *National*

Institute of Standards and Technology serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keamanan IKD dilakukan melalui: (a) pemberian *personal identification number (PIN)*; (b) pemberian menu lepas perangkat pada aplikasi IKD jika dilakukan pergantian perangkat dan/atau nomor *smartphone*; dan (c) pemblokiran IKD jika *smartphone* dilaporkan hilang oleh Penduduk kepada Menteri melalui Dirjen.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan IKD? Caranya adalah (1) Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada PlayStore (Android) /App Store (IOS); (2) Pemohon melakukan registrasi aplikasi melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital, dengan mengisi NIK, alamat surat elektronik (email), dan nomor *smartphone*; (3) Pemohon melakukan swafoto dengan kamera *smartphone*. Kemudian melakukan verifikasi data dan Scan QR code dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kantor Dinas Dukcapil atau di Kantor Camat; (4) Admin/Operator Dinas Dukcapil melakukan validasi data serta mengirimkan PIN aktivasi yang di-*generate* dari system, melalui email kepada pemohon; (5) Pemohon membuka email tautan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan memasukan PIN Aktivasi dan mengisi kode Captcha pada laman <https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web>; (6) Untuk penerbitan Identitas Kependudukan Digital penduduk membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selanjutnya menekan tombol menu KTP digital dan memasukan PIN; (7) KTP digital telah diterbitkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

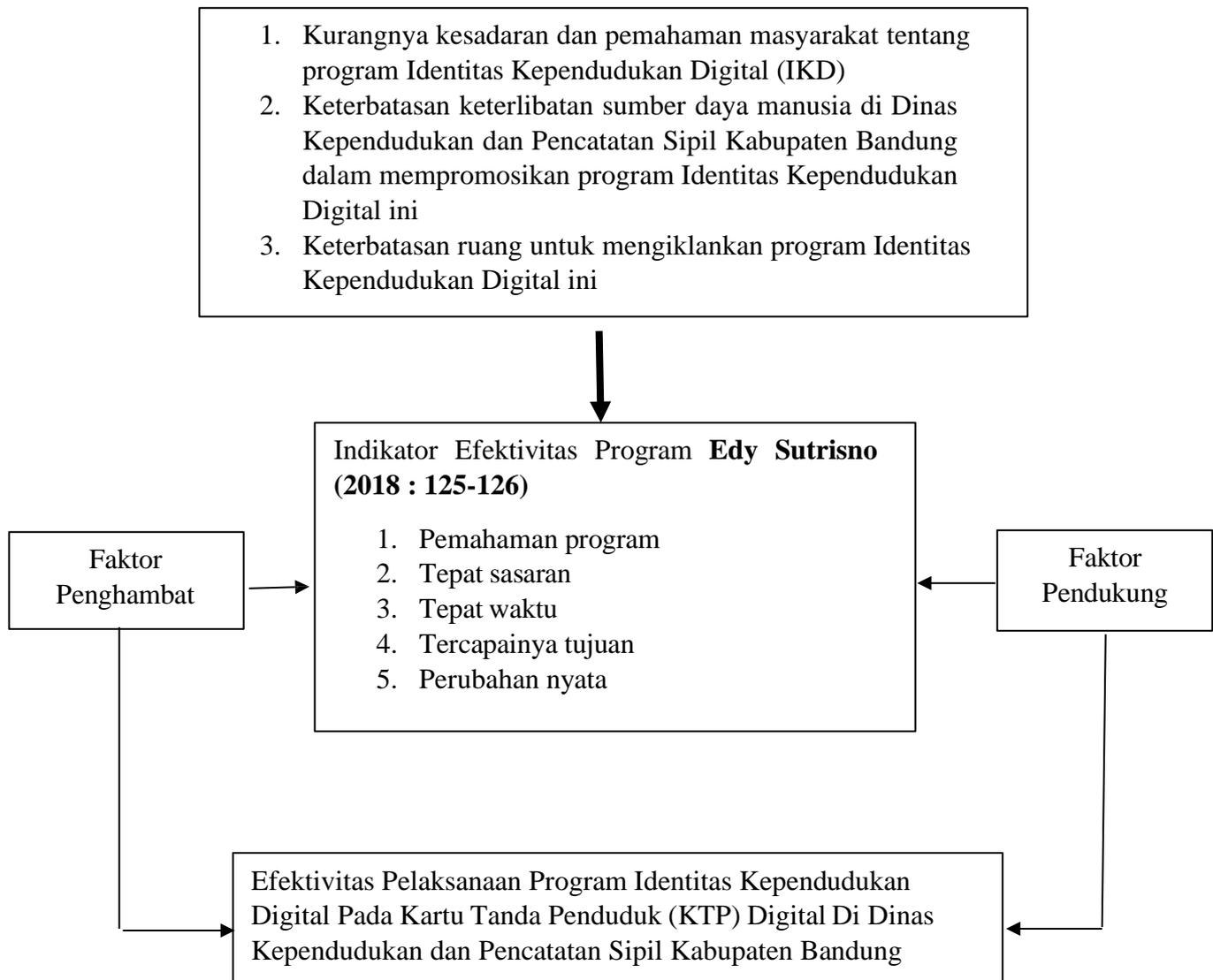
Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep – konsep dari penelitian. **Sugiyono (2018 : 128)** menyatakan bahwa

“kerangka berpikir yang baik menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel *dependent* dengan variabel *independent* yang akan di teliti.”

Deskripsi mengenai kerangka berpikir untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Efektivitas disini sebagai tolak ukur sejauh mana program tersebut berjalan dengan efektif. Maka dari itu, dalam efektivitas dapat di ukur menggunakan teori **Edy Sutrisno (2018 : 125-126)** yaitu pemahaman program, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program Identitas Kependudukan Digital, hal ini terlihat dari masyarakat harus mengetahui program Identitas Kependudukan Digital ini seperti apa dan untuk apa mereka melakukannya. Kemudian tepat sasaran sangat penting bagaimana pemerintah merealisasikan program ini kepada masyarakat sebagai sasarannya, hal ini terlihat dari pemerintah harus melihat sasaran yang tepat agar program ini dapat berjalan dengan efektif. Tepat waktu untuk melihat penggunaan waktu pada pelaksanaan program yang telah direncanakan, hal ini terlihat pada penggunaan waktu yang tepat sangat penting dalam keberlangsungan program agar program bisa dikatakan efektif. Tercapainya tujuan untuk melihat kegiatan atau program apa saja yang sudah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya, hal ini terlihat dari pemantauan dan evaluasi terhadap program – program tersebut akan membantu dalam mengevaluasi pencapaian tujuan Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Dan perubahan nyata sebagai bukti dampak yang dirasakan masyarakat sebelum dan sesudah menerapkan program ini, hal ini terlihat dari masyarakat yang bisa merasakan dampak yang baik setelah menerapkan program ini. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu

Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung akan berjalan efektif.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Edy Sutrisno (2018 : 125-126) Diolah Peneliti, 2024

2.3 Proposisi

Proposisi adalah pernyataan tentang sesuatu yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi sebagai pernyataan yang menjelaskan kebenaran atau menyatakan perbedaan atau hubungan antara beberapa konsep, selain itu diartikan sebagai hubungan logis antara dua

variabel (**Satibi 2017 : 197**). **Edy Sutrisno (2018:125-126)** Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat berjalan efektif apabila memperhatikan indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat berjalan efektif, apabila dalam pelaksanaannya melalui Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.